

**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 9. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900.1.1/3457-III/BPKAD Tahun 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 Nomor 22);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp4.251.653.974.385,00 (Empat triliun dua ratus lima puluh satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah; dan
- b. Pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp308.179.019.000,00 (Tiga ratus delapan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp109.088.865.000,00 (Seratus sembilan miliar delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp175.679.229.193,00 (Seratus tujuh puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.241.372.542,00 (Enam miliar dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.169.552.265,00 (Tujuh belas miliar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp 109.088.865.000,00 (Seratus sembilan miliar delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame;
 - b. pajak air tanah;
 - c. pajak sarang burung walet;
 - d. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - e. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - f. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

- (2) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sebesar Rp997.500.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sebesar Rp58.275.000,00 (Lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c sebesar Rp 36.750.000,00 (Tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d sebesar Rp 4.725.000.000,00 (Empat miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (6) Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e sebesar Rp4.200.000.000,00 (Empat miliar dua ratus juta rupiah).
- (7) Anggaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f sebesar Rp 6.300.000.000,00 (Enam miliar tiga ratus juta rupiah).
- (8) Anggaran pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g sebesar Rp26.244.000.000,00 (Dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh empat juta rupiah).
- (9) Anggaran Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h sebesar Rp34.353.000.000,00 (Tiga puluh empat miliar tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah).
- (10) Anggaran Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i sebesar Rp32.174.340.000,00 (Tiga puluh dua miliar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp175.679.229.193,00 (Seratus tujuh puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Anggaran Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sebesar Rp170.566.029.193,00 (Seratus tujuh puluh miliar lima ratus enam puluh enam juta dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).

- (3) Anggaran Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b sebesar Rp4.313.200.000,00 (Empat miliar tiga ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Anggaran Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp6.241.372.542,00 (Enam miliar dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) yang berasal dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp6.241.372.542,00 (Enam miliar dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp17.169.552.265,00 (Tujuh belas miliar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh lima rupiah), yang berasal dari Pendapatan BLUD.
- (2) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp17.169.552.265,00 (Tujuh belas miliar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.943.474.955.385,00 (Tiga triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.323.280.479.000,00 (Tiga triliun tiga ratus dua puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 620.194.476.385,00 (Enam ratus dua puluh miliar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp3.323.280.479.000,00 (Tiga triliun tiga ratus dua puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Desa;
 - b. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sebesar Rp124.533.420.000,00 (Seratus dua puluh empat miliar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b sebesar Rp2.547.000.000.000,00 (Dua triliun lima ratus empat puluh tujuh miliar rupiah).
- (4) Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c sebesar Rp443.152.265.000,00 (Empat ratus empat puluh tiga miliar seratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (5) Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d sebesar Rp208.594.794.000,00 (Dua ratus delapan miliar lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp 620.194.476.385,00 (Enam ratus dua puluh miliar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a sebesar Rp344.383.476.385,00 (Tiga ratus empat puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).

- (3) Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b sebesar Rp275.811.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus sebelas juta rupiah).

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 4.636.653.974.385,00 (Empat triliun enam ratus tiga puluh enam miliar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah); yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp2.940.031.589.269,06 (Dua triliun sembilan ratus empat puluh miliar tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh sembilan koma nol enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa; dan
 - c. Belanja hibah.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.312.135.186.904,00 (Satu triliun tiga ratus dua belas miliar seratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.568.496.751.767,06 (Satu triliun lima ratus enam puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh koma nol enam rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.399.650.598,00 (Lima puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.312.135.186.904,00 (Satu triliun tiga ratus dua belas miliar seratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp595.616.817.891,50 (Lima ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus enam belas juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus sembilan puluh satu koma lima rupiah).
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp675.409.549.610,50 (Enam ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh koma lima rupiah).
 - (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.354.453.714,00 (Dua puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat belas rupiah).
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp757.465.688,00 (Tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
 - (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp996.900.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (Sebelas miliar rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.568.496.751.767,06 (Satu triliun lima ratus enam puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh koma nol enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;

- d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp675.359.175.706,97 (Enam ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam koma sembilan puluh tujuh rupiah).
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp439.408.728.013,11 (Empat ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga belas koma sebelas rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.052.301.924,00 (Empat belas miliar lima puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp226.840.588.027,98 (Dua ratus dua puluh enam miliar delapan ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh tujuh koma sembilan puluh delapan rupiah).
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp22.759.489.904,00 (Dua puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp31.208.825.050,00 (Tiga puluh satu miliar dua ratus delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima puluh rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp149.049.483.521,00 (Seratus empat puluh sembilan miliar empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.399.650.598,00 (Lima puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.151.330.598,00 (Lima puluh tujuh miliar seratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.248.320.000,00 (Dua miliar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp1.237.692.982.415,94 (Satu triliun dua ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima belas koma sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.387.838.370,00 (Empat puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp99.114.264.614,78 (Sembilan puluh sembilan miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat belas koma tujuh puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp382.507.672.587,16 (Tiga ratus delapan puluh dua miliar lima ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh koma enam belas rupiah).

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp706.574.414.400,00 (Tujuh ratus enam miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat belas ribu empat ratus rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.704.461.122,00 (Satu miliar tujuh ratus empat juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh dua rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.404.331.322,00 (Satu miliar empat ratus empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp99.114.264.614,78 (Sembilan puluh sembilan miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat belas koma tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Alat Peraga;
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.353.747.179,00 (Satu miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.512.410.754,52 (Empat belas miliar lima ratus dua belas juta empat ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh empat koma lima puluh dua rupiah).

- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp571.861.416,00 (Lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.002.329.736,00 (Sebelas miliar dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.977.715.609,29 (Empat belas miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus sembilan koma dua puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.769.734.159,00 (Satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 8.099.616.862,33 (Delapan miliar sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus enam puluh dua koma tiga puluh tiga rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.272.656.458,86 (Satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan koma delapan puluh enam rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp10.415.508.868,78 (Sepuluh miliar empat ratus lima belas juta lima ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh delapan koma tujuh puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp470.555.679,00 (Empat ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp83.864.548,00 (Delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).
- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp331.062.745,00 (Tiga ratus tiga puluh satu juta enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).

- (14) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 63.350.712,00 (Enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua belas rupiah);
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 16.804.751.950,00 (Enam belas miliar delapan ratus empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 17.385.097.937,00 (Tujuh belas miliar tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp382.507.672.587,16 (Tiga ratus delapan puluh dua miliar lima ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh koma enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp375.236.372.587,16 (Tiga ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh koma enam belas rupiah).
- (3) Belanja Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp231.300.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.040.000.000,00 (Tujuh miliar empat puluh juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp706.574.414.400,00 (Tujuh ratus enam miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat belas ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp562.353.795.791,00 (Lima ratus enam puluh dua miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.435.078.830,00 (Dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
 - (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp82.359.942.279,00 (Delapan puluh dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.415.597.500,00 (Tiga puluh tujuh miliar empat ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.704.461.122,00 (Satu miliar tujuh ratus empat juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan; dan
 - b. Belanja Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp311.357.550,00 (Tiga ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah).

- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.393.103.572,00 (Satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.404.331.322,00 (Satu miliar empat ratus empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), yang berasal dari Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.404.331.322,00 (Satu miliar empat ratus empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 23

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 448.929.402.700,00 (Empat ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.910.467.200 (Empat miliar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp444.018.935.500,00 (Empat ratus empat puluh empat miliar delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.910.467.200 (Empat miliar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa;
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.920.752.500,00 (Tiga miliar sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp989.714.700,00 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp444.018.935.500 (Empat ratus empat puluh empat miliar delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang berasal dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp444.018.935.500 (Empat ratus empat puluh empat miliar delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Pasal 27

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp385.000.000.000,00 (Tiga ratus delapan puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 28

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000.000,00 (Empat ratus miliar rupiah), yang berasal dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000.000,00 (Empat ratus miliar rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000.000,00 (Empat ratus miliar rupiah), yang berasal dari Penghematan Belanja.
- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000.000,00 (Empat ratus miliar rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah), yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah).

Pasal 31

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp-385.000.000.000,00 (Minus tiga ratus delapan puluh lima miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp385.000.000.000,00 (Tiga ratus delapan puluh lima miliar rupiah).
- (3) Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenan (SILPA) terhadap ayat (1) dan ayat (2) adalah Rp0 atau Nihil.

Pasal 32

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Paser ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuanganbersifatumum dan bersifatkhusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 33

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Paser ini.

Pasal 34

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Bupati Paser ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Paser dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 30 Desember 2024



Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

A black ink signature of Katsul Wijaya is written over the text "KATSUL WIJAYA".

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 49



KABUPATEN PASER

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	308.179.019.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	109.088.865.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	997.500.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	997.500.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	997.500.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	58.275.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	58.275.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	58.275.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	36.750.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	36.750.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	36.750.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.725.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.725.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.725.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.200.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	4.200.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	4.200.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.300.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	4.000.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	4.000.000.000,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	2.300.000.000,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	2.300.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	26.244.000.000,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	8.925.000.000,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	8.925.000.000,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	16.164.000.000,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	16.164.000.000,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	1.050.000.000,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	1.050.000.000,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	73.500.000,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	73.500.000,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	31.500.000,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	31.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	34.353.000.000,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	34.353.000.000,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	34.353.000.000,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	32.174.340.000,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	32.174.340.000,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	32.174.340.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	175.679.229.193,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	170.566.029.193,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	167.315.029.193,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	5.908.912.682,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	160.556.116.511,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	850.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.430.000.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.430.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	221.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	221.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.600.000.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	500.000.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	500.000.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	600.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	4.313.200.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	160.000.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	150.000.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	10.000.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	1.850.000.000,00
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	1.850.000.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	399.700.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	399.700.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	115.000.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	115.000.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	300.000.000,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	300.000.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	141.000.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	141.000.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	472.500.000,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	250.000.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	125.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	97.500.000,00
4.1.02.02.18	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air	25.000.000,00
4.1.02.02.18.0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air	25.000.000,00
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	850.000.000,00
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	850.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	800.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	600.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	600.000.000,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	200.000.000,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	200.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.241.372.542,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.241.372.542,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.241.372.542,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.241.372.542,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	17.169.552.265,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	17.169.552.265,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	17.169.552.265,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	17.169.552.265,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.943.474.955.385,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.323.280.479.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	124.533.420.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	124.533.420.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	124.533.420.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.547.000.000.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	463.188.593.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	400.106.504.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	62.227.879.650,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	854.209.350,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	2.076.282.752.000,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	27.122.585.425,00
4.2.01.07.02.0002	DBH SDA Gas Bumi	54.021.738.575,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	8.038.212.450,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	1.982.367.991.550,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	3.261.841.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	1.470.383.000,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	7.528.655.000,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	7.528.655.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	443.152.265.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	309.164.117.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	309.164.117.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	133.988.148.000,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.000.000.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	63.338.023.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	26.289.562.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	17.984.801.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	25.375.762.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	208.594.794.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	43.430.521.000,00
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	200.000.000,00
4.2.01.09.01.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	216.600.000,00
4.2.01.09.01.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	34.725.761.000,00
4.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	8.288.160.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	165.164.273.000,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	46.623.327.000,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.390.250.000,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	84.404.277.000,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.597.798.000,00
4.2.01.09.02.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	6.830.254.000,00
4.2.01.09.02.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.204.495.000,00
4.2.01.09.02.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjangan	774.930.000,00
4.2.01.09.02.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3.768.400.000,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3.546.919.000,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	12.008.623.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	620.194.476.385,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	344.383.476.385,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	344.383.476.385,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	328.361.644.385,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	967.232.000,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	15.054.600.000,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	275.811.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	275.811.000.000,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	275.811.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	4.251.653.974.385,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	2.940.031.589.269,06
5.1.01	Belanja Pegawai	1.312.135.186.904,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	595.616.817.891,50
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	441.577.511.722,70
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	255.233.823.043,70
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	186.343.688.679,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	48.328.699.933,76
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	24.897.893.917,80
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	23.430.806.015,96
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.282.642.299,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.282.642.299,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	22.947.557.860,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	18.937.046.560,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.010.511.300,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	11.796.911.859,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.890.342.827,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	7.906.569.032,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	30.881.703.767,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	14.900.563.193,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	15.981.140.574,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.939.395.259,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.237.267.096,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	702.128.163,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	105.194.403,04
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	43.756.605,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	61.437.798,04
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	20.004.800.000,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	18.003.600.000,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.001.200.000,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	777.675.000,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	750.000.000,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	27.675.000,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.856.477.788,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.772.977.788,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	83.500.000,00
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)	8.118.248.000,00
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	8.118.248.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	675.409.549.610,50
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	499.917.452.417,15
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	366.159.555.392,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	133.757.897.025,15
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	1.582.878.822,00
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	1.582.878.822,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	80.460.550.491,35
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	80.460.550.491,35
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	120.344.630,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	120.344.630,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	93.328.323.250,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	49.875.000,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	2.913.750,00
5.1.01.02.06.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	1.837.500,00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	236.250.000,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	211.250.000,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	315.000.000,00
5.1.01.02.06.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	0,00
5.1.01.02.06.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	1.312.200.000,00
5.1.01.02.06.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.717.650.000,00
5.1.01.02.06.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opensi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.608.717.000,00
5.1.01.02.06.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	200.000.000,00
5.1.01.02.06.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	15.000.000,00
5.1.01.02.06.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	50.000.000,00
5.1.01.02.06.0038	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal	15.000.000,00
5.1.01.02.06.0039	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	10.000.000,00
5.1.01.02.06.0041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	5.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.06.0042	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan	15.000.000,00
5.1.01.02.06.0045	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	50.000.000,00
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	50.000.000,00
5.1.01.02.06.0051	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	12.500.000,00
5.1.01.02.06.0062	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	50.000.000,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	84.404.277.000,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.597.798.000,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	526.281.000,00
5.1.01.02.06.0069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	871.774.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	28.354.453.714,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	738.969.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	738.969.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	98.119.560,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	98.119.560,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	126.025.284,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	126.025.284,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	73.896.900,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	73.896.900,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.071.505.050,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.071.505.050,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	111.136.410,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	111.136.410,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	17.584.875,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	17.584.875,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.620.671.635,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.620.671.635,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.455.300.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.455.300.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	28.445.000,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	28.445.000,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	11.604.800.000,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	77.000.000,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	7.700.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	10.000.000,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	11.510.100.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.048.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.048.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	360.000.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	360.000.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	757.465.688,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	207.936.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	207.936.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	45.818.700,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	45.818.700,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	363.921.600,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	363.921.600,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	24.254.320,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	24.254.320,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	14.654.588,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	14.654.588,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	102.880,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	102.880,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	345.600,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	345.600,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	432.000,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	432.000,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	100.000.000,00
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	100.000.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	996.900.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	396.900.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	396.900.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	11.000.000.000,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	11.000.000.000,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	11.000.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.568.496.751.767,06
5.1.02.01	Belanja Barang	675.359.175.706,97
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	675.115.849.795,58
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	956.209.296,66
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.537.215.377,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.937.634.830,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	5.954.844,00
5.1.02.01.01.0007	Belanja Bahan-Barang dalam Proses	98.443,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	181.168.994,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	21.307.230,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	27.651.259,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.070.830.978,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	32.694.374,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.410.417.473,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	7.350.975,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	21.496.268,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	5.557.416,00
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	55.952.215,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	6.077.755,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	334.395.772,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.082.994.168,66
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.255.307.233,06
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.715.445.149,51
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	126.527.503,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.050.672.877,21
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.437.123.073,80
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.904.084.482,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	4.376.240.269,08
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	76.528.554,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.838.656.662,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	929.427.879,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	6.562.385.915,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	12.838.360.734,66
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	484.583.478.917,74
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	85.113.927.973,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	4.168.130.334,20
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	63.069.155,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	90.735.900,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.004.356.534,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.358.094.448,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	635.118.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	833.592.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	487.015.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.332.373.393,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	448.500.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	186.000.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	255.000.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	93.000.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	98.786.500,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	93.000.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	587.984.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	877.400.000,00
5.1.02.01.01.0079	Belanja Barang Sampel Pangan	519.640,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	36.095.047,00
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	7.911.707,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	14.266.335,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	13.917.005,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	207.230.864,39
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	192.500.000,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	14.730.864,39
5.1.02.02	Belanja Jasa	439.408.728.013,11
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	330.767.865.517,11
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.233.617.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.907.682.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	329.400.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.991.760.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1.824.000.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	171.600.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	419.360.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	564.000.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	45.452.457.400,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	31.070.665.853,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	557.084.353,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	378.624.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	5.000.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	355.695.020,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	7.245.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	177.175.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	74.988.480.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	84.700.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	18.900.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	24.652.672.899,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	43.027.977.268,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	24.346.673.485,94
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	32.900.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	127.225.500,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.268.400.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	21.450.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	62.245.800,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	181.859.600,00
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	150.000.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	100.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	10.271.595.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	95.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	2.140.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	511.330.036,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	321.862.200,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	56.448.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	22.500.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.306.492.320,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	7.000.052,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2.191.553.316,21
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	21.624.629.870,61
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	296.535.204,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.662.008.881,35
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	18.282.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	7.670.000,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	36.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	926.574.900,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	3.370.112.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	819.462.188,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	97.774.941,00
5.1.02.02.01.0078	Belanja Sewa Jasa Internet	23.833.804,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.277.883.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.065.327.625,00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	247.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	69.417.093.604,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.538.614.520,00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	55.864.253.600,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.428.679.044,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.585.546.440,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	378.000.000,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	378.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.013.523.285,00
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	8.871.000,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	13.354.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.326.136.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.363.185.620,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	128.473.046,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	240.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	328.795.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	59.775.000,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	24.300.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	442.000.000,00
5.1.02.02.04.0126	Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat	2.600.000,00
5.1.02.02.04.0128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	7.100.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	62.500.000,00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	354.706.869,00
5.1.02.02.04.0453	Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian	651.726.750,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.817.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.046.000.000,00
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	64.000.000,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	39.000.000,00
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	353.000.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	315.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	950.000.000,00
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	150.000.000,00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	800.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.687.294.200,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	720.000.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	0,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.967.294.200,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	440.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	440.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	19.500.032.719,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	13.486.763.477,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	679.375.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	4.853.203.242,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	480.691.000,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	167.421.667,00
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	167.421.667,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	270.497.021,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	270.497.021,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	14.052.301.924,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.288.403.093,00
5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	197.536.000,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	272.460.470,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	440.465.280,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.879.544.537,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	121.080.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	78.070.000,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	176.400.000,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	20.000.000,00
5.1.02.03.02.0090	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	7.500.000,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	141.000.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	19.500.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	88.080.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	685.550.569,00
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	875.000,00
5.1.02.03.02.0195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	187.720.000,00
5.1.02.03.02.0376	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	97.630.455,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	524.704.265,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	350.286.517,00
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.200.745.358,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.028.174.958,00
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	150.000.000,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	22.570.400,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.498.153.473,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.725.622.648,00
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	225.910.400,00
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.542.181.925,00
5.1.02.03.04.0068	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	4.438.500,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	65.000.000,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	65.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	226.840.588.027,98
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	226.840.588.027,98
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	177.496.722.855,99
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	43.454.516.848,99
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	967.092.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4.922.256.323,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	22.759.489.904,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.852.712.904,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.493.071.904,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	492.500.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	4.194.061.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	46.000.000,00
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	1.627.080.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.906.777.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	13.906.777.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	31.208.825.050,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	31.208.825.050,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	30.305.162.550,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	903.662.500,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	9.818.159.620,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	9.818.159.620,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	9.818.159.620,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	149.049.483.521,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	149.049.483.521,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	149.049.483.521,00
5.1.05	Belanja Hibah	59.399.650.598,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	57.151.330.598,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	48.962.800.945,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	48.962.800.945,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.694.425.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.694.425.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	260.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	260.000.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.234.104.653,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.234.104.653,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.248.320.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.248.320.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.248.320.000,00
5.2	BELANJA MODAL	1.237.692.982.415,94
5.2.01	Belanja Modal Tanah	46.387.838.370,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	46.387.838.370,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	19.000.000.000,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	19.000.000.000,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	27.387.838.370,00
5.2.01.01.03.0002	Belanja Modal Tanah Lapangan Parkir	2.460.200.000,00
5.2.01.01.03.0004	Belanja Modal Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	150.000.000,00
5.2.01.01.03.0005	Belanja Modal Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	5.277.638.370,00
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	3.500.000.000,00
5.2.01.01.03.0008	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	16.000.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.114.264.614,78
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.353.747.179,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	905.649.648,00
5.2.02.01.01.0008	Belanja Modal Aggregate and Concrete Equipment	905.649.648,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	448.097.531,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	49.671.154,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	105.840.082,00
5.2.02.01.03.0007	Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	207.410.229,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.01.03.0012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	54.152.751,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	31.023.315,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	14.512.410.754,52
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	14.507.575.189,52
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.245.125.802,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	4.782.944.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	432.613.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	471.127.439,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	7.575.764.948,52
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	4.835.565,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	4.835.565,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	571.861.416,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	398.771.931,00
5.2.02.03.01.0002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	18.742.770,00
5.2.02.03.01.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	24.715.060,00
5.2.02.03.01.0004	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	240.340.581,00
5.2.02.03.01.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Khusus	20.529.200,00
5.2.02.03.01.0008	Belanja Modal Peralatan Las	94.444.320,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	69.834.906,00
5.2.02.03.02.0001	Belanja Modal Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	14.491.992,00
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	38.393.226,00
5.2.02.03.02.0012	Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam	16.949.688,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	103.254.579,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	26.145.060,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	77.109.519,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	11.002.329.736,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	11.002.329.736,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	419.666.549,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	12.421.887,00
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	65.610.000,00
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	10.504.631.300,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	14.977.715.609,29
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	3.535.380.318,51
5.2.02.05.01.0001	Belanja Modal Mesin Ketik	23.204.930,00
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	2.882.609,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	195.012.042,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.314.280.737,51

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	8.818.315.923,78
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.631.769.245,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	71.531.124,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	2.415.227.194,78
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	75.261.111,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.811.583.576,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	812.943.673,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.624.019.367,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	736.696.324,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	78.532.737,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	482.472.628,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	29.675.980,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	1.296.641.698,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.769.734.159,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	1.728.699.670,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	317.553.335,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.080.193.661,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	68.644.729,00
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	262.307.945,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	41.034.489,00
5.2.02.06.02.0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	41.034.489,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.099.616.862,33
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	6.379.335.395,33
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	2.871.400.940,35
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	39.700.733,38
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	10.671.038,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	3.457.562.683,60
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.720.281.467,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.720.281.467,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.272.656.458,86
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	745.941.613,12
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	99.988.000,00
5.2.02.08.01.0014	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	523.624.284,90
5.2.02.08.01.0055	Belanja Modal Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	122.329.328,22
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	37.035.644,00
5.2.02.08.03.0014	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	37.035.644,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	439.956.825,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.08.07.0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara	439.956.825,00
5.2.02.08.09	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	49.722.376,74
5.2.02.08.09.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	49.722.376,74
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	10.415.508.868,78
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	7.463.159.719,72
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	7.463.159.719,72
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.952.349.149,06
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	510,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.620.942.366,09
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	331.406.272,97
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	470.555.679,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	449.157.431,00
5.2.02.15.02.0002	Belanja Modal Masker	102.950.000,00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	8.119.656,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	338.087.775,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	21.398.248,00
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	21.398.248,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	83.864.548,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	83.864.548,00
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	37.265.124,00
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	46.599.424,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	331.062.745,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	331.062.745,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	331.062.745,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	63.350.712,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	63.350.712,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	63.350.712,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	16.804.751.950,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	16.804.751.950,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	16.318.164.450,00
5.2.02.89.01.0002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	486.587.500,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	17.385.097.937,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	17.385.097.937,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	17.385.097.937,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	382.507.672.587,16
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	375.236.372.587,16
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	363.804.772.587,16

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	73.195.074.564,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	419.187.500,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	93.484.135.587,16
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	3.500.000.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	40.677.944.000,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	111.907.891.354,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	10.000.000.000,00
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	349.012.630,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	599.717.235,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	310.490.400,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	29.092.223.700,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	269.095.617,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	11.431.600.000,00
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	8.931.600.000,00
5.2.03.01.02.0005	Belanja Modal Asrama	2.500.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	231.300.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	231.300.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	231.300.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	7.040.000.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	7.040.000.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	7.040.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	706.574.414.400,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	562.353.795.791,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	443.536.573.166,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	426.902.633.166,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	8.336.940.000,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	8.297.000.000,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	118.817.222.625,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	118.817.222.625,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	24.435.078.830,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	158.902.452,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	158.902.452,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	24.276.176.378,00
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	24.276.176.378,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	82.359.942.279,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	55.431.226.079,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	55.431.226.079,00

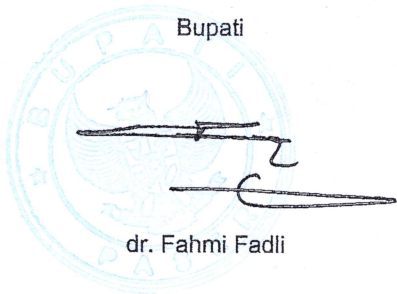
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	2.124.379.200,00
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	2.124.379.200,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	24.774.228.000,00
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	24.774.228.000,00
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	30.109.000,00
5.2.04.03.06.0003	Belanja Modal Instalasi Pusat Pengatur Listrik	30.109.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	37.415.597.500,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	30.568.563.000,00
5.2.04.04.01.0003	Belanja Modal Jaringan Cabang Distribusi	30.568.563.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	6.847.034.500,00
5.2.04.04.02.0001	Belanja Modal Jaringan Transmisi	4.572.074.500,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	2.274.960.000,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	10.000.000,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	10.000.000,00
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	10.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.704.461.122,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	311.357.550,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	203.194.550,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	201.349.925,00
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	0,00
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	0,00
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	0,00
5.2.05.01.01.0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	1.844.625,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	108.163.000,00
5.2.05.01.02.0003	Belanja Modal Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya	108.163.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.393.103.572,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	1.393.103.572,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	1.383.554.336,00
5.2.05.02.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	9.549.236,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.404.331.322,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.404.331.322,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.404.331.322,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	806.331.322,00
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	598.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	448.929.402.700,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.910.467.200,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3.920.752.500,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.920.752.500,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.920.752.500,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	989.714.700,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	989.714.700,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	989.714.700,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	444.018.935.500,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	444.018.935.500,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	302.015.226.500,00
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	302.015.226.500,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	142.003.709.000,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	142.003.709.000,00
	Jumlah Belanja	4.636.653.974.385,00
	Total Surplus/(Defisit)	-385.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	400.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	400.000.000.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	400.000.000.000,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	150.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	40.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	100.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	10.000.000.000,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	250.000.000.000,00
6.1.01.05.02.0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	50.000.000.000,00
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	100.000.000.000,00
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	100.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	15.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	15.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	15.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	385.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Paser, 30 Desember 2024

Bupati

The block contains a circular official stamp of Kabupaten Paser, which includes a star and the word 'BUPATI'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

dr. Fahmi Fadli